

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno: 2006). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi perkembangan perekonomian suatu negara. Dimana negara tersebut kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa terus meningkat dari periode ke periode lainnya. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara, seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi kegiatan ekonomi yang sudah ada, dan berbagai perkembangan lainnya.

Menurut Yulianita, salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah atau daerah tersebut.

Menurut Todaro (2006), terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu:

1. Akumulasi Modal
2. Pertumbuhan Penduduk
3. Kemajuan teknologi

Menurut Adam Smith dalam Kuncoro (2004) proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat.

Pembangunan ekonomi adalah usaha - usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita (Suparmoko, 2002). Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Salah satu tujuan

pembangunan ekonomi yang lain adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi pengangguran dan secara langsung dapat meningkatkan pendapatan nasional dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Soebagiyo (2007), keberhasilan pembangunan ekonomi daerah baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat swasta dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduknya dapat dinilai dari besarnya tingkat pertumbuhan PDRB. Pembangunan ekonomi sendiri memiliki tiga sifat penting, yang pertama adalah pembangunan sebagai suatu proses yang berarti merupakan perubahan tahap yang harus dijalani. Kedua, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Ketiga, peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang (Hasibuan, 1987). Bagi negara berkembang seperti Indonesia, banyaknya aliran modal merupakan kesempatan yang baik untuk memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi daerah dikatakan meningkat jika ada kenaikan PDRB dari tahun sebelumnya. PDRB adalah semua barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada pada suatu daerah tertentu yang dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya oleh berbagai unit produksi dalam satu tahun. Besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bervariasi diakibatkan karena keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor produksi daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Secara tradisional

pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan berkelanjutan (Kuncoro, 2004), Secara teori semakin besar PDRB, maka akan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh daerah. Dengan semakin besarnya pendapatan yang diperoleh daerah, maka pengalokasian belanja oleh pemerintah pusat akan lebih besar untuk meningkatkan berbagai potensi lokal daerah untuk kepentingan publik.

Pembangunan di Kabupaten Flores Timur yang berlangsung secara berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan masyarakat merupakan agregat pembangunan dari seluruh Kabupaten Flores Timur yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Namun di sisi lain, berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat provinsi maupun di Kabupaten/Kota.

2.1.2 Struktur APBD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah ;
2. Belanja Daerah; dan
3. Pembiayaan Daerah.

Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah meliputi: (a) Pendapatan Asli Daerah; (b) Dana Perimbangan, dan (c) Lain-Lain Pendapatan.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri.

PAD terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah.
- 2) Retribusi Daerah.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang mencakup:
 - a) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD);
 - b) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN); dan
 - c) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
- 4) Lain-lain PAD yang Sah, yang meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - c) Jasa giro;
 - d) Pendapatan bunga;
 - e) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah;
 - f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - h) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - i) Pendapatan denda pajak dan retribusi;
 - j) Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - k) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - l) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
- B. Dana Perimbangan, meliputi:
- 1) Dana Alokasi Umum;
 - 2) Dana Alokasi Khusus; dan
 - 3) Dana Bagi Hasil, yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak.
- C. Pendapatan Lain-Lain yang Sah, meliputi:
- 1) Pendapatan Hibah;
 - 2) Pendapatan Dana Darurat;
 - 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota;

- 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya;
- 5) Dana Penyesuaian; dan
- 6) Dana Otonomi Khusus.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

a. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2), klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Perumahan Rakyat;
- 5) Penataan Ruang;

- 6) Perencanaan Pembangunan;
- 7) Perhubungan;
- 8) Lingkungan Hidup;
- 9) Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 10) Pemberdayaan Perempuan;
- 11) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 12) Sosial;
- 13) Tenaga Kerja;
- 14) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 15) Penanaman Modal;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Pemuda dan Olah Raga;
- 18) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 19) Pemerintahan Umum;
- 20) Kepegawaian;
- 21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 22) Statistik;
- 23) Arsip; dan
- 24) Komunikasi dan Informatika.

b. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan

- 1) Pertanian;
- 2) Kehutanan;
- 3) Energi dan Sumber Daya Mineral;

- 4) Pariwisata;
- 5) Kelautan dan Perikanan;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian; dan
- 8) Transmigrasi.

c. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan, serta Jenis Belanja

Belanja daerah tersebut mencakup:

- 1) Belanja Tidak Langsung; dan
- 2) Belanja Langsung.

Komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung, meliputi:

- a) Belanja Pegawai;
- b) Bunga;
- c) Subsidi;
- d) Hibah;
- e) Bantuan Sosial;
- f) Belanja Bagi Hasil;
- g) Bantuan Keuangan; dan
- h) Belanja Tak Terduga.

2. Belanja Langsung, meliputi:

- a) Belanja Pegawai;
- b) Belanja Barang dan Jasa;

c) Belanja Modal.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

a. Penerimaan Pembiayaan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 60 menyebutkan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah, meliputi:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Penerimaan pinjaman daerah;
- 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- 6) Penerimaan piutang daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah, meliputi:

- 1) Pembentukan dan cadangan;
- 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 3) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo; dan

4) Pemberian pinjaman daerah.

Karena Modul ini disiapkan untuk pejabat Eselon II, maka uraian lebih rinci tentang pembiayaan daerah tidak diberikan, tetapi dapat dilihat pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 62 sampai dengan Pasal 77.

2.1.3 Belanja Modal

Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan mempertinggi intensitas ekonomi. Menurut (Halim 2004) belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti belanja pemeliharaan dan kelompok belanja administrasi umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 menyebutkan bahwa belanja modal pemerintah adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) membagi belanja modal menjadi lima bagian yaitu:

1. Belanja modal tanah
2. Belanja jalan, irigasi dan jaringan
3. Belanja gedung dan bangunan
4. Belanja peralatan dan mesin
5. Belanja aset tetap lainnya

Belanja modal berperan dalam peningkatan kualitas layanan publik sekaligus menjadi stimulus dalam perekonomian. Belanja jalan, jaringan,

peralatan dan mesin dapat mendorong kelancaran proses usaha sektor swasta guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain hal tersebut, pemerintah juga mengalokasikan belanja peralatan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan serta pendidikan daerah. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 pasal 53 ayat 1, Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Pengelolaan APBD di berbagai daerah masih belum efektif ditunjukkan dengan alokasi belanja pegawai yang terus meningkat dibandingkan dengan alokasi belanja modal untuk pembangunan daerah yang justru terus menurun. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan belanja modal untuk pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil dinas dan pembelanjaan lain yang tidak tepat sasaran. Seharusnya belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatannya, hal ini akan bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. Pada prinsipnya alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah atau masyarakat di daerah bersangkutan.

2.1.3 Tenaga kerja

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut BPS penduduk berumur sepuluh keatas terbagi sebagai tenaga kerja. Dikatakan tenaga kerja apabila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu. Jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka (Mulyadi, 2003).

Tenaga kerja diduga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana Peningkatan tenaga kerja yang diimbangi dengan peningkatan output yang dihasilkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dimaksud. Meningkatnya jumlah tenaga kerja akan memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksinya dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat (Sukirno, 2008:430). Menurut Todaro (2000:112). Pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, dan jumlah tenaga kerja yang lebih besar.

1.2 Hubungan Antara Variabel

2.2.1 Hubungan antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi

Pengeluaran Pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2000).

2.2.2 Hubungan antara tenaga kerja dengan pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran keadaan suatu perekonomian dari suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan meningkatnya jumlah barang dan jasa (output) yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam penelitian ini khususnya di Kabupaten Flores Timur. Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir mencakup semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode satu tahun. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan perekonomian dalam suatu daerah. Selanjutnya

ditambahkan oleh Mankiw (2006) indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam konteks ekonomi regional, ukuran yang sering dipergunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di wilayah itu.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Pakpahan, Evalina. Pengaruh Belanja Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB	Regresi Linera Berganda	1. Variabel belanja modal dan tenaga kerja secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara bersama-sama belanja modal dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kota Medan periode tahun 2012 – 2016. 2. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Medan dapat meningkatkan Belanja Modal yang lebih banyak diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Peranan belanja modal sangat penting sehingga dapat dikatakan sebagai penentu keberhasilan tujuan pembangunan ekonomi yang ditargetkan. 3. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja maka dibutuhkan tenaga kerja berkualitas hal ini dapat dilakukan melalui alokasi

			anggaran pendidikan. Pemerintah juga ikut dalam merancang kurikulum yang bersifat kompetensi sehingga lulusan sekolah menengah atas sederajat maupun lulusan perguruan tinggi tidak hanya siap bersaing di pasar tenaga kerja namun juga siap membuka lapangan kerja berkualitas.
2	Momuat, Rosita C.M. Pengaruh Belanja Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado	Regresi Linear Berganda	Pembangunan harus dilihat sebagai proses multidimensi mencakup tidak hanya pembangunan ekonomi, namun juga mencakup perubahan-perubahan utama dalam struktur sosial, prilaku, dan kelembagaan. pembangunan harus pula berupaya untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran atau upaya menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk sebab dengan kesempatan kerja masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kota Manado adalah salah satu kota yang mengalami perkembangan pembangunan dalam kurun 10 tahun terakhir karena adanya investasi. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Manado selama kurun waktu tahun terakhir ini selalu mengalami kenaikan. Kebijakan perluasan kesempatan kerja merupakan suatu kebijakan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan ekonomi suatu negara atau bangsa adalah kesempatan kerja yang diciptakan oleh adanya pembangunan ekonomi. Penelitian ini mengkaji pengaruh belanja modal dan tenaga

			kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Hasil penelitian diketahui bahwa belanja modal dan penyerapan tenaga kerja sangat berhubungan erat serta signifikan dan bersifat positif dengan pertumbuhan ekonomi Kota Manado. Dimana apabila variabel belanja modal dan penyerapan tenaga kerja meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
3	Putri, Phany Ineke, (2014). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal, Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa	Metode Kuadrat Terkecil (OLS)	1. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu PMDN, PMA, tenaga kerja, belanja modal, infrastruktur yang meliputi jalan aspal, dan listrik mempunyai pengaruh yang positif signifikan, sedangkan variabel jalan tidak aspal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa periode tahun 2007-2011. Secara bersama-sama variabel PMDN, PMA, tenaga kerja, belanja modal, infrastruktur yang meliputi jalan aspal, jalan tidak aspal, dan listrik berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa periode tahun 2007-2011. 2. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah di masing-masing provinsi diharapkan dapat meningkatkan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Pulau Jawa melalui kebijakan menjaga

			stabilitas ekonomi, politik dan keamanan dalam negeri, memperbaiki sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang serta mempermudah peraturan dalam berinvestasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat menarik investasi asing dengan cara menciptakan iklim investasi yang kondusif, penyederhanaan proses perijinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga diharapkan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dapat semakin meningkat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. 3. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan alokasi anggaran untuk pendidikan guna mempertinggi kualitas tenaga kerja, memberikan latihan keterampilan bagi tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja sehingga output meningkat dan pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi di Pulau Jawa. Rekomendasi yang dapat diajukan belanja modal pemerintah sangat dibatasi oleh sumber penerimaan yang lebih banyak berasal dari pemerintah pusat. Ditambah lagi, sumber penerimaan tersebut lebih banyak tersedot untuk belanja rutin sehingga
--	--	--	--

			alokasi anggaran untuk belanja modal pemerintah menjadi terbatas. Dengan belanja modal pemerintah yang tersedia, seharusnya dialokasikan secara tepat kepada proyek investasi yang mempunyai dampak multiplier yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal lebih diarahkan kepada pembangunan infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan jalan ke daerah-daerah produksi.
4	Azwardi, Pengaruh Belanja Modal Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Di Indonesia 2009-2012	Regresi Linear Berganda	Berdasarkan estimasi terhadap persamaan regresi, diketahui nilai R^2 sebesar 81,22 persen berarti variabel belanja modal dan tenaga kerja dapat menjelaskan PDRB provinsi di Indonesia sebesar 81,22 persen. Berdasarkan uji parsial (uji t) diketahui bahwa variabel belanja modal selama periode 2011-2012 berpengaruh nyata secara positif terhadap PDRB provinsi atau sejalan dengan teori ekonomi. Sedangkan tenaga kerja tidak berpengaruh nyata secara negatif atau tidak sejalan dengan teori ekonomi. Hasil estimasi terhadap persamaan tersebut, diketahui selama periode tersebut belanja modal dapat mendorong peningkatan PDB (<i>output effects</i>), sehingga berpengaruh terhadap PDRB provinsi. Namun tenaga kerja secara statistik belum dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain disebabkan oleh produktivitas tenaga kerja yang rendah, sehingga nilai tambah yang diciptakanpun relatif rendah.
5	Priambodo, Agung Analisis Pengaruh	metode Generalized	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana

	Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Least Square (GLS)	pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan adalah data 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2012. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi data panel model efek tetap dengan metode Generalized Least Square (GLS). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD, belanja modal, dan tenaga kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Simpulan dari penelitian ini adalah perlunya mengoptimalkan penggalan pajak daerah, alokasi belanja modal diharapkan kepada pembangunan infrastruktur, dan perlunya pelatihan atau kursus keterampilan guna peningkatan kualitas tenaga kerja.
--	--	--------------------	--

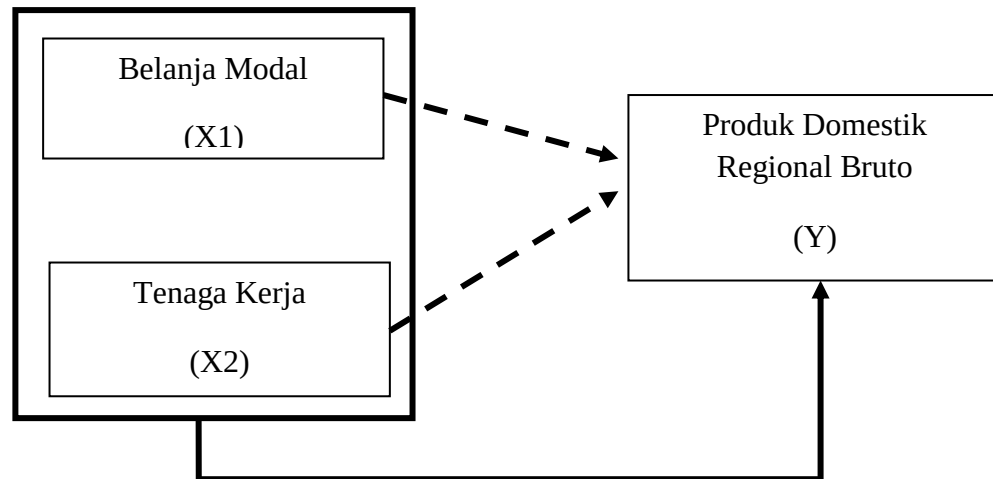
2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup penulisan ini adalah Kabupaten Flores Timur, dimana variabel yang diteliti antara lain variabel independen yaitu Belanja modal (X_1), dan tenaga kerja (X_2), sedangkan PDRB sebagai variabel dependen (Y).

Hubungan antara Belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi yaitu pengeluaran pemerintah dalam alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Melalui peningkatan belanja modal APBD tersebut diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk kegiatan produksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Kurniawan, dkk, 2011). Dengan demikian terdapat hubungan yang positif antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara Tenaga Kerja dengan pertumbuhan ekonomi yaitu tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Pertumbuhan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Akan tetapi permasalahannya adalah sampai berapa banyak penambahan tenaga kerja akan terus meningkatkan output. Kualitas sumber daya manusia dan kemajuan teknologi produksi dan penambahan tenaga kerja akan memacu pertumbuhan ekonomi. Namun tidak dapat dipungkiri jumlah tenaga kerja yang dapat dilibatkan dalam proses produksi akan semakin sedikit bila teknologi yang digunakan semakin tinggi (Rahardja, 2004). Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi dimana apabila jumlah tenaga kerja bertambah maka akan menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran Penelitian



Keterangan :

- > : Pengaruh Parsial
 —————> : Pengaruh Simultan

2.5 Hipotesis Skripsi

1. Belanja Modal dan tenaga Kerja diduga berpengaruh parsial secara signifikan dan positif terhadap PDRB di Kabupaten Flores Timur.
2. Belanja Modal dan tenaga Kerja diduga berpengaruh Simultan secara signifikan dan positif terhadap PDRB di Kabupaten Flores Timur.